

PENGEMBANGAN PERTANIAN DALAM MENGURANGI KETIMPANGAN DESA-KOTA MENUJU PENGUATAN EKONOMI JAWA BARAT

Agricultural Development In Reducing Rural-Urban Inequality Towards Strengthening The Economy Of West Java

Dahri Tanjung^{1*}, Agit Kriswantriyono², Yulia Puspawati Wulandari³; Didik Suharjito⁴; Yeti Lis Purnamadewi⁵

^{1,2,3}CARE LPPM IPB University

⁴Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, IPB University

⁵Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Manajemen, IPB University

*Email correspondence: ir.da@apps.ipb.ac.id

ABSTRAK

Salah satu permasalahan pembangunan ekonomi Jawa Barat saat ini adalah masih tingginya ketimpangan yang terjadi antara pembangunan ekonomi di perkotaan dan pedesaan. Tahun 2022 terdapat 3.285 rural/desa dan 2.672 urban/perkotaan di Jawa Barat. Ada sebanyak 4,07 juta (7,98%) penduduk miskin di Jawa Barat, yang menyebar di pedesaan sebanyak 1,03 juta (9,75%) lebih tinggi daripada jumlah penduduk miskin di perkotaan yang sebanyak 3,02 juta (7,52%). Ketimpangan ini penting untuk segera diatasi, karena telah menjadi penyebab terus meningkatnya urbanisasi dari tahun ke tahun. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengembangan potensi ekonomi sektoral perdesaan untuk penguatan pembangunan ekonomi dan kehidupan yg berkelanjutan. Metode penelitian yang dilakukan adalah survey lapang ke beberapa desa di wilayah up-land-dan low-land Jawa Barat. Data primer dikumpulkan dan dianalisis menggunakan metode Sustainable Livelihood Approach (SLA). Metode ini akan menilai perbedaan akses masyarakat pada aset: (1) aset sumberdaya alam (SDA), (2) sumber daya manusia (SDM), (3) sumberdaya ekonomi/finansial, (4) sumberdaya fisik/infrastruktur, dan (5) aset sumberdaya sosial. Hasil penelitian menunjukkan peran penting dari sumberdaya alam di pedesaan (pertanian dan laut). Sehingga pemanfaatannya menjadi potensi utama pendorong ekonomi desa. Namun keterbatasan pengetahuan dan keahlian SDM masih menjadi penghambat pengembangannya. Pada sisi sistem agribisnis, sumberdaya finansial seperti permodalan masih menjadi kendala bagi produsen. Peran pedagang perantara/agen/perusahaan menjadi sangat penting. Sementara peran pemerintah desa masih minim terkait pengembangan produk, lebih banyak peran pemerintah kota/Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Peran BUMDES terhadap pengembangan produk unggulan desa juga terbilang minim. Dari sisi tipologi desa, wilayah dengan ciri lowland lebih kondusif dalam pengembangan agribisnis pertanian dilihat berdasarkan indikator SDM, SDI dan SDE. Sementara desa dengan tipologi upland cenderung kondusif berdasarkan indikator SDA dan SDS. Dengan demikian implikasi penelitian ini adalah: diperlukannya peningkatan potensi SDM agar mampu meningkatkan kualitas usaha tani yang lebih profesional; diperlukannya peningkatan infrastruktur pendukung pengembangan komoditi unggulan di desa; serta diperlukannya dukungan pemerintah desa dengan pendampingan kepada pelaku usaha.

Kata Kunci: *desa-kota; ekonomi; kehidupan berkelanjutan; ketimpangan; sumberdaya*

ABSTRACT

One of the problems of West Java's current economic development is the high inequality that occurs between urban and rural economic development. In 2022 there are 3,285 rural/village and 2,672 urban/urban areas in West Java. There are 4.07 million (7.98%) poor people in West Java, distributed in rural areas with 1.03 million (9.75%) higher than the number of poor people in urban areas with 3.02 million (7.52%). It is important to address this imbalance, as it has been the cause of increasing urbanisation from year to year. The purpose of this research is to analyse the development of rural sectoral economic potential for strengthening economic development and sustainable living. The research method is a field survey to several villages in the up-land and low-land areas of West Java. Primary data was collected and analysed using the Sustainable Livelihood Approach (SLA) method. This method will assess differences in community access to assets: (1) natural resource assets, (2) human resources, (3) economic/financial resources, (4) physical/infrastructure resources, and (5)

social resource assets. The results show the important role of natural resources in rural areas (agriculture and marine). Therefore, their utilisation is a major potential driver of the village economy. However, limited knowledge and expertise of human resources are still an obstacle to its development. On the agribusiness system side, financial resources such as capital are still a constraint for producers. The role of intermediary traders/agents/companies is very important. Meanwhile, the role of the village government is still minimal related to product development, more the role of the city / district, provincial and central government. The role of BUMDES in the development of village superior products is also minimal. In terms of village typology, areas with lowland characteristics are more conducive to agribusiness development based on indicators of human resources, SDI and SDE. While villages with upland typology tend to be conducive based on indicators of natural resources and SDS. Thus, the implications of this research are: the need to increase the potential of human resources in order to be able to improve the quality of farming businesses that are more professional; the need to improve supporting infrastructure for the development of superior commodities in the village; and the need for village government support with assistance to business actors.

Keywords: economy; inequality; resources; rural-urban; sustainable living

Pendahuluan

Setelah pandemi covid-19 mereda, maka kegiatan ekonomi Provinsi Jawa Barat mulai bangkit. Hal ini ditunjukkan oleh angka laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 3,74% di tahun 2021 menjadi 5,45% di tahun 2022 (BPS, 2023). Namun demikian bila ditinjau lebih jauh, pembangunan ekonomi tersebut masih memiliki berbagai permasalahan dan bahkan bisa ditingkatkan lagi. Salah satu permasalahan pembangunan ekonomi Jawa Barat saat ini adalah masih tingginya ketimpangan yang terjadi antara pembangunan ekonomi di perkotaan dan pedesaan. Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Barat sebenarnya mencatat kemiskinan di Jawa Barat telah menurun dari 8,40% tahun 2021 menjadi 8,06% di 2022. Terdapat 14,64 juta penduduk miskin di pedesaan atau 12,53 persen pada September 2021, lebih tinggi daripada jumlah penduduk miskin di kota yang sebanyak 11,86 juta atau 7,6 persen. Ketimpangan antara desa dengan kota penting untuk segera diatasi, karena hal itu menjadi penyebab terus meningkatnya urbanisasi dari tahun ke tahun. Secara khusus untuk membangun pedesaan, berbagai terobosan yang inovatif sangat diharapkan. Berbagai investasi, seperti dana desa sebaiknya tidak hanya menyasar kepada pembangunan infrastruktur, namun juga aspek lain seperti aspek kualitas ekonomi maupun kualitas SDM dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Merujuk kepada permasalahan ketimpangan pembangunan ekonomi daerah, secara khusus antara pedesaan dengan perkotaan di Jawa Barat mendorong keingintahuan (*curiosity*) untuk mendalami permasalahan yang terjadi dan mencari berbagai teori dan praktek baik di tempat lain dalam penyelesaian ekonomi domestik. Berbekal hal tersebut ingin dibandingkan lebih lanjut di beberapa desa dan kota Jawa Barat. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengembangan potensi ekonomi sektoral khususnya pertanian perdesaan untuk penguatan pembangunan ekonomi dan kehidupan yang berkelanjutan di Jawa Barat.

Metode Penelitian

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari Juni-Desember tahun 2022. Adapun metode penelitian ini adalah survey lapang ke 7 desa dan 2 kota di wilayah up-land (Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung) dan low-land (Indramayu).

Jenis data dan Sumber data

Data yang digunakan dalam studi ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara terhadap sejumlah informan dengan menggunakan panduan

pertanyaan. Selain melalui wawancara, data primer juga diperoleh melalui FGD (*Focus Group Discussion*) dan observasi/pengamatan langsung di lapangan. Data sekunder dikumpulkan melalui *desk study* dari dokumen-dokumen yang bersumber dari mitra maupun dari instansi terkait yang ada di tingkat Kota/kabupaten, kecamatan dan tingkat desa/kelurahan.

Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut: 1) Data Demografi: jumlah penduduk, mata pencaharian, agama, pendidikan, pola penguasaan lahan dan lain-lain; 2) Data Geografi: topografi, letak lokasi ditinjau dari aspek geografis, aksesibilitas lokasi; 3) Data UMKM: Data profil UMKM yang memiliki jaringan bisnis lintas kota dan provinsi, bagaimana jalur tata niaganya dan lain-lain; 4) Data IDM: variabel ketahanan ekonomi, sosial dan lingkungan desa; serta 5) Potensi pendukung penghidupan berkelanjutan berupa sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), sumber daya infrastruktur (SDI), sumber daya ekonomi (SDE) dan sumber daya sosial (SDS).

Teknik Analisis Data

1. Analisis Location Quotient (LQ)

Data sekunder yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan Analisis LQ. Analisis ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor ekonomi di suatu wilayah dengan memanfaatkan sektor basis atau *leading sector*. Lebih spesifik lagi teknik LQ ini banyak digunakan untuk membahas kondisi perekonomian yang mengarah pada kegiatan perekonomian untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sektor unggulan sebagai *leading sector* suatu kegiatan ekonomi industri. Teknik LQ ini membandingkan *share output* sektor *i* di kota atau kabupaten dengan *share output i* di tingkat provinsi. Rumus matematika yang digunakan untuk membandingkan kemampuan sektor-sektor di suatu wilayah adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{\frac{Li}{Lt}}{\frac{Ni}{Nt}}$$

Keterangan:

Li= jumlah komoditi *i* di tingkat kabupaten/kota

Lt= total jumlah komoditi di tingkat kabupaten/kota

Ni= jumlah komoditi *i* di tingkat Provinsi Jawa Barat

Nt= total jumlah komoditi di tingkat Provinsi Jawa Barat

Kriteria:

LQ > 1 artinya, komoditas itu menjadi basis

LQ =< 1 artinya, komoditas tersebut tergolong non basis

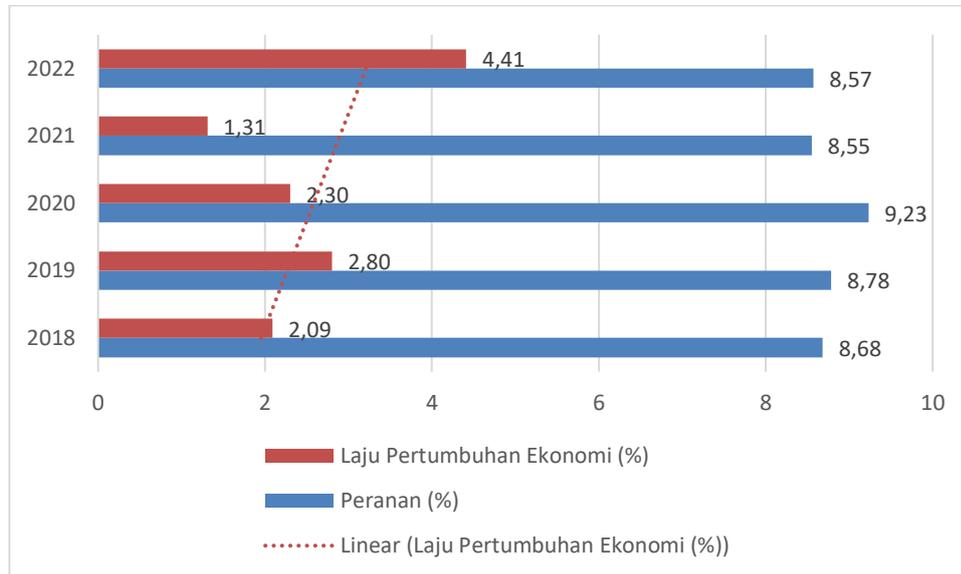
2. Analisis Potensi Kehidupan Berkelanjutan/SLA

Alat analisis yang digunakan untuk menganalisis potensi kehidupan berkelanjutan adalah analisis pentagon. Disebut analisis pentagon karena bentuknya segi lima (pentagon) ini bisa digunakan untuk menunjukkan perbedaan akses masyarakat pada aset-aset atau sumber daya. Dalam studi ini, aset yang dimaksud adalah (1) aset sumberdaya alam (SDA), (2) aset sumber daya manusia (SDM), (3) aset sumberdaya finansial, (4) aset sumberdaya fisik/infrastruktur; dan (5) aspek sumberdaya sosial.

Hasil dan Diskusi

Data BPS Jawa Barat tahun 2022 menunjukkan sektor pertanian termasuk salah satu lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang positif, yaitu sebesar 4,41%. Ditinjau dari struktur ekonomi Provinsi Jawa Barat menurut lapangan usaha,

posisi pertanian secara luas menempati posisi ketiga (8,57%) setelah industri pengolahan (42,24%) dan perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (14,40%). Sebagai salah satu penopang ekonomi terbesar Jawa Barat, lapangan usaha pertanian secara umum terpusat di pedesaan.



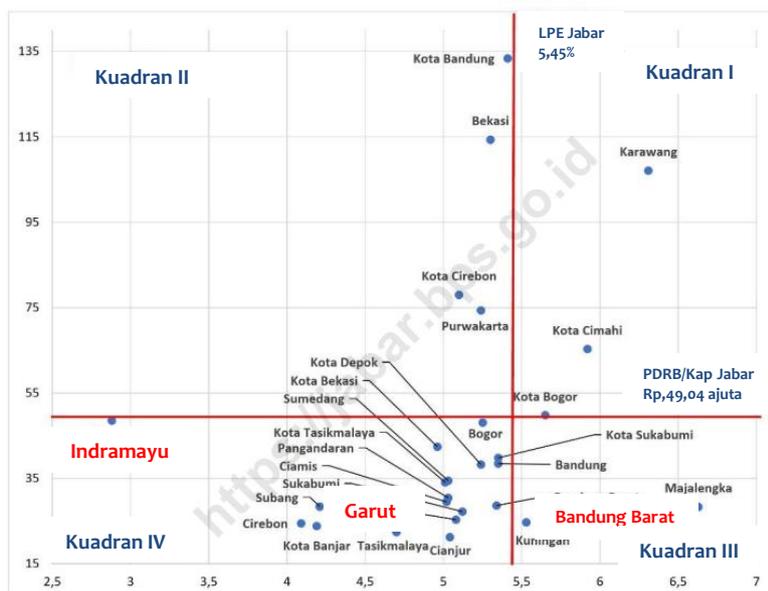
Gambar 1. Peranan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Lapangan Usaha Pertanian di Jawa Barat, 2018-2022 (persen)

Jika ditinjau lebih lanjut berdasar struktur ekonomi kategori pertanian tersebut, maka sub kategori tanaman pangan memiliki peranan paling besar. Selanjutnya adalah tanaman hortikultura, peternakan dan perikanan.

Untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah digunakan analisis *Klassen Typology* (Sjafrizal, 1997). Dikemukakan bahwa analisis ini digunakan untuk membedakan suatu daerah menjadi empat klasifikasi, yaitu 1) daerah maju dan tumbuh cepat (*rapid growth region*) apabila memiliki laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dan tingkat pendapatan per kapita lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita provinsi; 2) daerah maju tapi tertekan (*retarded region*) apabila LPE lebih kecil tetapi pendapatan per kapita lebih besar dari provinsi; 3) daerah berkembang cepat (*growing region*) yaitu daerah yang berkembang cepat apabila LPE lebih besar akan tetapi pendapatan per kapita lebih rendah dari provinsi; dan 4) daerah relatif tertinggal (*relatively backward region*) apabila memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita provinsi.

Gambar 2 berikut menunjukkan perbandingan LPE kabupaten/kota dan PDRB per kapita kabupaten/kota dengan LPE dan PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Daerah yang mempunyai LPE dan PDRB per kapita lebih tinggi dari provinsi terletak pada kuadran I. Pada kuadran II adalah daerah yang memiliki LPE lebih rendah dengan PDRB lebih tinggi dari provinsi.

Adapun daerah yang memiliki LPE lebih tinggi dan PDRB lebih rendah dibanding provinsi ada pada kuadran III. Pada kuadran IV, adalah daerah yang memiliki LPE dan PDRB per kapita lebih rendah dibanding provinsi.



Sumber: PBS Jawa Barat, 2023

Gambar 2. LPE dan PDRB per kabupaten/kota dibanding Provinsi Jabar (2022)

Pertumbuhan ekonomi Jawa barat perlu dijaga agar terus tumbuh, karena sangat mempengaruhi kestabilan ekonomi. Karena peranan konsumsi rumah tangga dalam pembentukan PDRB Jawa barat sangat besar dibanding faktor lainnya, seperti investasi, maka pemerintah Jawa Barat sangat berkepentingan menjaga tingkat konsumsi ini tetap tumbuh dan tidak tertekan oleh tingginya inflasi. Kondisi inflasi jangan sampai terlalu rendah karena akan menekan pertumbuhan ekonomi. Begitu juga sebaliknya bila inflasi terlalu tinggi, terjadi penurunan daya beli masyarakat yang berdampak kepada penurunan pertumbuhan ekonomi.

Upaya menjaga kestabilan inflasi untuk meningkatkan daya beli masyarakat dilakukan pemerintah dengan menjaga kestabilan harga barang dan jasa yang bisa dikendalikan (administered price) seperti harga BBM, gas elpiji maupun tarif dasar listrik. Hal ini akan tidak terlalu membebani pengeluaran masyarakat meski pendapatannya tidak ada kenaikan signifikan. Selanjutnya terjaganya stabilitas ekonomi ini tidak lepas dari upaya pemerintah dalam mengontrol kenaikan harga khususnya yang berasal dari komoditas pangan (volatile food) dan harga yang diatur pemerintah. Termasuk yang penting adalah bagaimana caranya inflasi terjaga rendah namun dengan pertumbuhan ekonomi yang meningkat, sehingga setidaknya mampu mendorong daya beli atau konsumsi masyarakat.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka ditentukanlah komoditi unggulan yang ada di Jawa barat dan selanjutnya ditentukan daerah kabupaten/kotanya. Selanjutnya dipilih kecamatan dan desa sentra produksi komoditas unggulan tersebut.

Penentuan Komoditas Unggulan

Penapisan pertama dalam penentuan lokasi studi dan komoditi unggulan di Provinsi Jawa Barat dilakukan melalui analisis LQ. Kegiatan diawali dengan pengumpulan data produksi pertanian, peternakan dan perikanan yang didapatkan dari data BPS Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Provinsi Jawa Barat dalam angka tahun 2022. Kemudian data-data tersebut diolah menggunakan Microsoft Excel untuk menghitung nilai LQ. Setelah itu, setiap

komoditi dengan nilai $LQ \geq 1$ dilakukan perangkungan. Hasil perhitungan nilai LQ terdapat beberapa Kabupaten dan Kota yang memiliki beberapa komoditi dengan nilai LQ cukup tinggi yang artinya wilayah-wilayah tersebut memiliki beberapa komoditi basis wilayah. Wilayah tersebut antara lain Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cirebon dan Sukabumi. Adapun komoditi dengan nilai LQ tinggi antara lain komoditi mangga, manggis, jeruk, kentang dan bawang merah untuk subsektor tanaman pangan; komoditi sapi potong dan sapi perah untuk sub sektor peternakan serta komoditi perikanan budidaya dan perikanan tangkap untuk subsektor perikanan.

Penapisan tahap kedua dilakukan melalui penyesuaian hasil nilai LQ dengan data komoditi unggulan menurut cluster pengembangan kawasan Jawa Barat. Berdasarkan data Renstra Bappeda tahun 2021, cluster wilayah pengembangan kawasan Jawa Barat terbagi pada 6 kluster yakni Priangan Timur (Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya), Andalan Sukabumi (Sukabumi), Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan), Andalan Cekungan Bandung (Bandung, Sumedang), Bodebek (Kabupaten Bogor, Depok, Bekasi) dan Bopuncur (Kabupaten Bogor, Cianjur). Dimana setiap kawasan tersebut memiliki komoditas unggulan pertanian dan lainnya, adapun gambarannya adalah sebagai berikut (Tabel 1):

Tabel 1. Komoditi Berdasarkan Cluster Pengembangan Kawasan Jabar (Bappeda Jabar 2021)

No	Wilayah	Komoditi		
		Pangan	Buah-Buahan	Sayuran
A. Kawasan Priangan Timur				
1	Kabupaten Ciamis	Jagung	Manggis	Cabai Merah
2	Garut	Padi, Kedelai, Tanah	Jagung, Kacang	Manggis, Jeruk Garut
3	Kabupaten Tasikmalaya	Padi, Kedelai, Tanah	Jagung, Kacang	Manggis
B. Kawasan Andalan Sukabumi				
1	Sukabumi	Kacang Tanah, Jagung	Manggis, Rambutan, Pepaya, Durian, Jeruk, Pisang	
C. Kawasan Ciayumajakuning				
1	Cirebon		Semangka, Blewah, Melon, Mangga	Bawang Merah
2	Indramayu	Padi	Semangka, Blewah, Melon, Mangga	
3	Majalengka	Jagung	Mangga	Cabai Merah, Bawang Merah
4	Kuningan	Ubi Jalar	Mangga, Durian	Bawang Merah

No	Wilayah	Komoditi		
		Pangan	Buah-Buahan	Sayuran
D. Andalan Cekungan Bandung				
1	Bandung	Padi, Jagung, Kedelai	Jeruk, Strawberry	Kentang, tomat, wortel, kubis
2	Sumedang	Padi, Jagung, Ubi Jalar		
E. Kawasan Andalan Bodebek				
1	Kabupaten Bogor	Padi, Kacang Tanah, Jagung	Durian, Melon, Semangka	
2	Depok	Padi, Kacang Tanah, Jagung		
3	Bekasi	Padi, Kacang Tanah, Jagung		
F. Bopuncur				
1	Kabupaten Garut	Kacang Tanah, Jagung	Pisang, Pepaya	
2	Cianjur	Kacang Tanah, Jagung	Pisang, Pepaya	

Sumber: Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat 2021

Penapisan ketiga dilakukan melalui koordinasi yang dilakukan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini Dinas Pertanian, Dinas Peternakan serta Dinas Perikanan Provinsi Jawa Barat, penentuan lokasi studi serta komoditi unggulan yang dikaji diarahkan ke beberapa sentra komoditi unggulan di Jawa Barat. Untuk komoditi pangan misalnya Jawa Barat merupakan produsen nasional terbesar dengan wilayah sentra Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang dan Kabupaten Karawang. Untuk komoditi hortikultura beberapa komoditi ikonik Jabar antara lain mangga terdapat di wilayah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Majalengka. Adapun untuk sayuran mayoritas tersebar di kawasan Priangan Timur. Sentra perikanan terbesar terdapat di wilayah Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon serta Kabupaten Sukabumi. Sentra Peternakan Sapi di wilayah Kabupaten Bandung dan Kambing di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

Peta Komoditi Unggulan

Berdasarkan diskusi tim dalam penentuan wilayah studi dan jenis komoditi unggulan, terpilih 3 wilayah studi yang mewakili gambaran kedua tipologi wilayah yaitu Kabupaten Indramayu mewakili tipologi wilayah lowland dengan komoditi unggulan beras, mangga dan perikanan, serta Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung yang mewakili tipologi wilayah upland (tabel 2) dengan komoditi unggulan jagung dan kentang untuk Kabupaten Garut dan komoditi unggulan sapi potong dan sapi perah untuk Kabupaten Bandung.

Tabel 2. Kluster Komoditi Unggulan Berdasarkan Wilayahnya

		Tipologi Wilayah	
		Lowland	Upland
Sistem Pengu-sahaan	Agriculture -Pangan -Horti	Beras Mangga (Indramayu)	Jagung Kentang (Kabupaten Garut)
	Fishery	Perikanan budidaya, tangkap (Indramayu)	
	Livestock	Sapi potong (Kabupaten Bandung)	sapi perah (Kabupaten Bandung)

Sumber: Data Primer Diolah (2022)

Gambaran Umum Sentra Komoditi Unggulan di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan hasil analisis LQ dan juga hasil survey menunjukkan bahwa komoditi unggulan di Provinsi Jawa Barat yang termasuk pada peringkat 3 besar secara nasional adalah sayuran, peternakan, perikanan, buah dan juga pangan. Berbagai hasil penelitian menunjukkan peran penting dari sumberdaya alam di pedesaan. Sehingga pemanfaatan sumber daya alam menjadi potensi utama desa baik di wilayah upland maupun lowland. Hal ini dapat dilihat dari mata pencaharian sebagian besar masyarakatnya sebagai petani atau nelayan. Beberapa produk pertanian, perikanan dan peternakan juga menjadi komoditas unggulan desa. Usaha pertanian telah dilakukan secara turun temurun baik secara otodidak maupun melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan yang diberikan oleh penyuluh pertanian. Namun dilihat dari latar belakang pendidikannya, mayoritas pendidikan masyarakat di desa-desa studi adalah setingkat SMP dan SMA. Jumlah lulusan perguruan tinggi di desa studi rata-rata < 7%. Sebagian besar lulusan perguruan tinggi yang diharapkan menjadi SDM penggerak pengembangan kegiatan agribisnis di desa, pada kenyataannya lebih banyak bekerja di luar bidang pertanian/perikanan/peternakan. Ketersediaan sarana pendidikan dasar saat ini relatif tersedia di desa atau di tingkat Kecamatan, bahkan perguruan tinggi relatif tersedia di tingkat Kabupaten.

Hubungan desa kota di beberapa wilayah lebih terlihat pada lini hilir dimana desa-desa menjadi pemasok utama produk-produk pangan ke wilayah kota sekitar. Pada lini hulu hubungan dalam penyediaan permodalan usaha dan sarana produksi terbilang kecil dapat dilihat dari arus investasi dari kota ke desa yang masih minim. Secara umum petani mengatasi kebutuhan modal usaha secara mandiri meski ada petani yang mendapatkan modal usaha dari pinjaman bank/koperasi/perusahaan mitra seperti pada contoh petani kentang untuk modal diberikan pinjaman dari perusahaan kota dimulai dari bibit hingga kebutuhan pendukung bertani lainnya serta penyerapan hasil panen, dimana modal tersebut akan dikurangi pada saat pembayaran pasca panen. Hal tersebut banyak dilakukan oleh pengusaha komoditi kentang karena lebih jelas dan aman secara pemasaran karena sudah ada penampungnya sehingga seluruh hasil panen bisa langsung diserap oleh perusahaan per panennya. Lahan atau ternak yang dikelola petani di desa umumnya adalah milik sendiri. Namun demikian ada pula lahan atau ternak milik orang lain yang dikelola petani dengan sistem sewa/bagi hasil/gadai. Meski demikian pemilik lahan atau ternak mayoritas orang sekitar desa/kecamatan dan masih memiliki hubungan kerabat dengan petani. Produk utama yang dihasilkan petani umumnya masih berbentuk produk primer (belum diolah).

Sementara itu, pada lini hilir hubungan desa kota terlihat dari target pasar mayoritas komoditi yang dihasilkan petani adalah ke wilayah-wilayah sekitar. Jangkauan pemasaran produk pertanian (secara umum) masih terbatas pada kota/kabupaten terdekat, hal ini karena

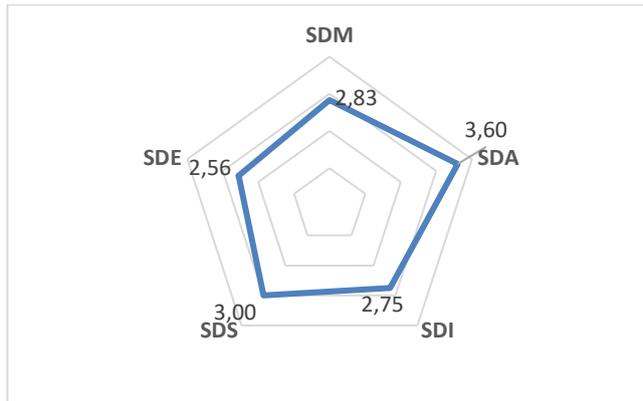
karakteristik produk pertanian sendiri yang mudah rusak. Sehingga seperti produk-produk dari Kabupaten Indramayu lebih banyak dijual ke Jabodetabek dan produk dari Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung lebih banyak dipasarkan di sekitar wilayah Priangan Selatan. Namun, ada pula beberapa produk yang dijual pada jangkauan area lebih jauh seperti mangga dan beras hingga ke Pulau Sumatera atau sebagian kecil komoditi kentang Garut dijual ke Pasar Kramat Jati di Jakarta dan Pasar Cibitung Kabupaten Bekasi. Khusus untuk produk susu yang telah diolah pasarnya dapat mencapai ke wilayah Bandung, Yogyakarta, Sukabumi dan Jakarta.

Berdasarkan rantai tata niaga produk, mayoritas produk yang dihasilkan petani dijual ke pedagang perantara/pengepul di sekitar desa/kecamatan sebelum pada akhirnya di jual ke pedagang perantara di Kota. Margin pemasaran tertinggi terdapat pada pedagang perantara dikarenakan ada resiko yang ditanggung seperti biaya transportasi, biaya sortasi dan grading, biaya pengemasan serta resiko kerusakan produk dan lain-lain. Begitu pula pada rantai pemasaran antara petani dan perusahaan/koperasi margin terbesar terdapat pada perusahaan/koperasi karena ada proses pengolahan produk. Pada aspek pemasaran permodalan terbesar rata-rata di pedagang perantara/agen/perusahaan yang membeli langsung produk hasil panen petani. Namun pada beberapa kasus seperti di komoditi perikanan budidaya dan sapi perah sistem penjualan dilakukan dengan sistem nota (dibayar setelah 2-3 kali pengiriman atau setelah 15 hari pengiriman). Begitupun dengan komoditi kentang industri modal awal dikeluarkan lebih awal oleh perusahaan yang kemudian akan dikurangi pada saat panen tiba.

Peran pemerintah di desa masih minim terkait pengembangan produk, lebih banyak peran pemerintah kota/Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa pelatihan, pendampingan usaha, dukungan infrastruktur atau sarana prasarana. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) terhadap pengembangan produk unggulan Desa terbilang minim. Usaha BUMDES yang ada rata-rata tidak terkait langsung dengan pengembangan komoditi unggulan desa.

Hasil SLA

Desa Padaawas, Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut memiliki tipologi kawasan dengan potensi utama di bidang pertanian seperti tanaman sayur kentang, kubis, cabai dan lainnya yang dapat tumbuh dengan baik pada kawasan upland. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya potensi kehidupan berkelanjutan pada aspek SDA (3,60). Tingginya aspek SDA ini didukung juga dengan pemanfaatan potensi alam cukup optimal oleh masyarakat setempat dimana hampir secara keseluruhan lahan dimanfaatkan oleh penduduk untuk ditanami berbagai macam sayuran, termasuk lahan milik negara melalui Perhutani juga dimanfaatkan untuk digunakan para petani menanam sayuran. Penggunaan lahan milik negara yang dimanfaatkan ini digunakan melalui skema Perhutanan Sosial yang perizinannya melalui kelompok tani dan penguasaannya dimanfaatkan secara perorangan. Apabila dilihat dari modal sosialnya, masyarakat Desa Padaawas juga tergolong terbuka atau mudah menerima orang baru dengan tujuan baik seperti ingin mengedukasi atau pengembangan desa, hal ini juga terbukti dari membukanya kesempatan kepada masyarakat dari kecamatan lain untuk menyewakan lahan kosongnya untuk ditanami kentang hingga akhirnya masyarakat setempat juga mulai mengikuti menanam kentang dan belajar membangun relasi untuk pengembangan usahanya. Sehingga modal sosial ini menjadi faktor pendukung yang cukup baik dalam mendukung pemanfaatan potensi SDA.



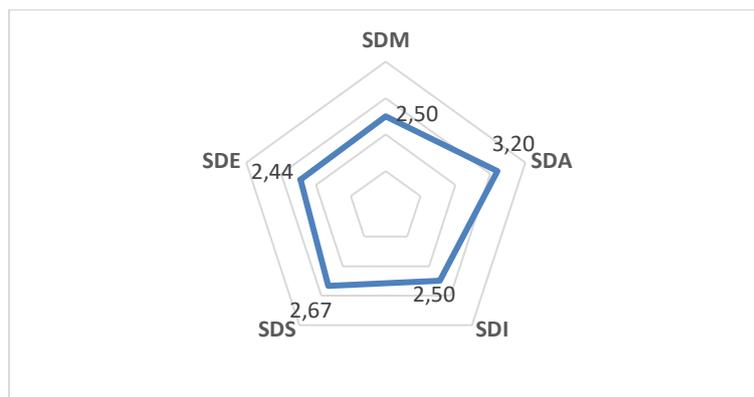
Gambar 3. Diagram Pentagon Sustainable Livelihood Approach (SLA) Desa Padaawas

Wilayah ini tergolong kategori desa dengan SDM yang cukup rendah jika dibandingkan dengan dua aspek lainnya (SDA dan SDS), hal tersebut dikarenakan mayoritas penduduk secara pendidikan formal masih rendah dimana rata-rata merupakan lulusan SD/ Sederajat, sedangkan untuk lulusan sarjana masih minim dan bukan lulusan pertanian. Sehingga saat ini, untuk pengembangan komoditi masih mengandalkan PPL dari Kecamatan dan Dinas Pertanian Kabupaten Garut.

Sementara itu, menurut para petani kendala yang dialami dalam pengembangan usaha komoditi sayuran kentang ini adalah minimnya modal dan juga infrastruktur pendukung usaha tersebut masih minim. Hal tersebut dapat dilihat dari rendahnya skor pada aspek SDE dan SDI, gambaran tersebut dikarenakan hingga saat ini akses petani terhadap lembaga keuangan untuk pemberian modal masih sulit kecuali yang sudah memiliki relasi mitra perusahaan di luar Kabupaten Garut. Dengan demikian, jika dilihat dari analisis SLA, dapat disimpulkan bahwa di Desa Padaawas dimana wilayah ini masih berada pada tipologi dataran tinggi memiliki kekuatan potensi pada aspek SDA dan SDS, akan tetapi kekuatan SDM nya masih rendah jika dilihat dari akses pendidikan dan faktor penghambat dalam pengembangan usaha selain dari SDM nya juga dari faktor SDE dan SDI.

Analisis Sustainable Livelihood Approach (SLA) Desa Dangdeur

Berdasarkan analisis yang tergambar pada diagram pentagon SLA (Gambar 80), menunjukkan bahwa Desa Dangdeur memiliki kekuatan potensi kehidupan berkelanjutan pada aspek SDA dengan skor 3.20, skor ini masih dibawah desa sebelumnya meskipun sama-sama berada di wilayah dataran tinggi. Hal yang membedakan adalah, masyarakat tersebut belum mampu memanfaatkan potensi tersebut secara optimal. Gambaran tersebut didukung dengan faktor potensi SDM yang masih rendah (2,50), dimana secara pendidikan formal masyarakat lebih banyak menempuh pendidikan hingga tingkat SD/Sederajat dan secara non formal masih minim pengetahuan penduduk terkait potensi tersebut. Hal ini terlihat dari minimnya masyarakat dari luar daerah untuk memberikan pelatihan dan lainnya terkait pengembangan usaha komoditi tanaman pangan sebagai ikon Desa Dangdeur. Kondisi ini terlihat dari rendahnya keterbukaan masyarakat bahkan perangkat daerah yang masih rendah, dimana masyarakat dari luar cenderung lebih sulit untuk masuk ke wilayah tersebut (SDS=2,67).



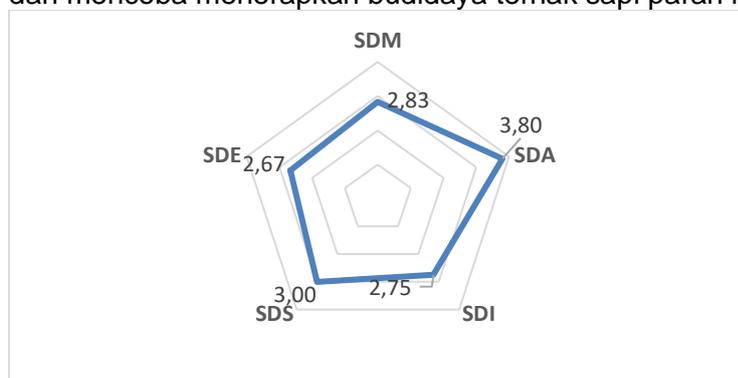
Gambar 4. Diagram Pentagon Sustainable Livelihood Approach (SLA) Desa Dangdeur

Akses dari jalan utama menuju Desa Dangdeur tergolong sulit dibandingkan dengan wilayah lainnya, dimana kondisi jalan agak rusak dan juga sangat jarang dilalui mengingat jaraknya cukup jauh dari jalan utama. Akses jalan yang kurang mendukung ini, tentunya memberikan hambatan bagi para penyuluh lapangan dari Kecamatan Banyuresmi untuk memberikan edukasi kepada para petani, sehingga intensitas pendampingan pun menjadi berkurang. Selain itu, faktor penghambat lainnya adalah minimnya sarana informasi di wilayah ini, dimana akses internet agak sulit. Wilayah ini juga masih minim pada aspek lembaga keuangan, mayoritas petani meminjam modal ke bandar atau ke bank negara yang berada di kota.

Analisis Sustainable Livelihood Approach (SLA) Desa Margamukti

Hasil analisis SLA menunjukkan bahwa Desa Margamukti, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung memiliki kekuatan potensi kehidupan berkelanjutan pada aspek SDA dengan skor 3.80, dimana potensi utama ini dioptimalkan oleh masyarakat setempat untuk mengembangkan usaha pada bidang pertanian dan peternakan sapi perah. Kondisi cuaca yang cukup mendukung membuat desa ini terkenal dengan penghasil susu segar dari sapi perah jenis FH. Tidak hanya itu, masyarakat juga memanfaatkan SDA melalui pengoptimalan penggunaan lahan untuk area penghijauan tanaman untuk bahan pakan ternak. Hal tersebut tentunya mampu mendongkrak perekonomian Desa Margamukti melalui pengembangan usaha tersebut meskipun kekuatan SDE Desa Margamukti (2,67) belum setinggi potensi SDA.

Menariknya, meskipun skor potensi SDM (2,83) masih dalam kategori kecil dimana rata-rata masyarakat setempat hanya menyelesaikan SD dan beberapa ada yang hingga SMP, namun keterbukaan masyarakat setempat terhadap orang baru dalam hal ini pemberi edukasi (penyuluh) sangat tinggi. Sehingga, masyarakat Desa Margamukti cukup maju dan bahkan secara wawasan lebih terbuka, hal ini digambarkan bagaimana masyarakat mendengarkan dan mencoba menerapkan budidaya ternak sapi perah mulai dari kandang hingga pakan.

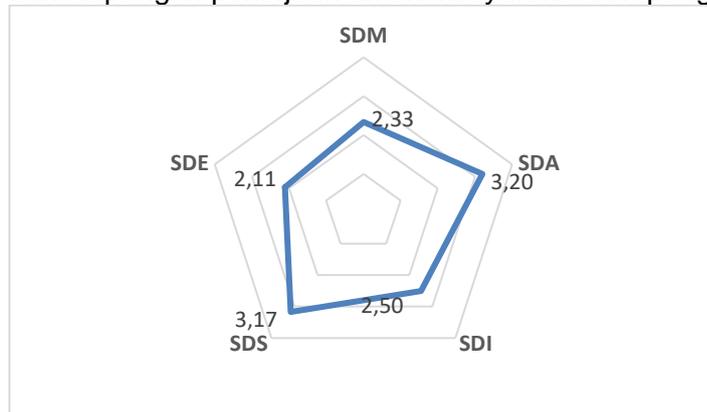


Gambar 5. Sustainable Livelihood Approach (SLA) Desa Margamukti

Ketiga kekuatan tersebut tentunya mampu meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi yang saat ini masih cenderung dalam kategori cukup rendah (2,83) hal tersebut dikarenakan jenis permodalan bagi para petani hanya ada khusus bagi para peternak sapi perah yakni dari KPBS dan tidak semua peternak bisa tergabung menjadi anggota tersebut. Apabila dilihat dari sumberdaya infrastrukturnya, Desa Margamukti memiliki kekuatan adanya fasilitas tempat penampungan sementara produk panen, namun jika dilihat dari akses jalannya tergolong kurang efektif karena area yang berbukit dan juga sempit.

Analisis Sustainable Livelihood Approach (SLA) Desa Srirahayu

Berdasarkan hasil analisis SLA yang tergambar pada diagram pentagon menunjukkan bahwa Desa Srirahayu, Kecamatan Cikancung, Kabupaten Garut memiliki potensi cukup tinggi pada aspek SDA dan juga SDS dimana kedua aspek tersebut memiliki skor >3. Sumberdaya alam yang dimiliki Desa Srirahayu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakatnya, hal ini tercermin dari masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan juga peternak. Adapun area lahan kosong telah dimanfaatkan untuk penanaman pakan ternak. Tingginya potensi SDA tersebut juga didukung dengan potensi SDS yang tinggi, dimana masyarakat cenderung terbuka terhadap orang baru, hal ini dibuktikan dengan penerimaannya masyarakat terhadap perusahaan yang mengembangkan usaha ternak sapi potong, hingga akhirnya membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat dan pengembangan usaha tingkat masyarakat.



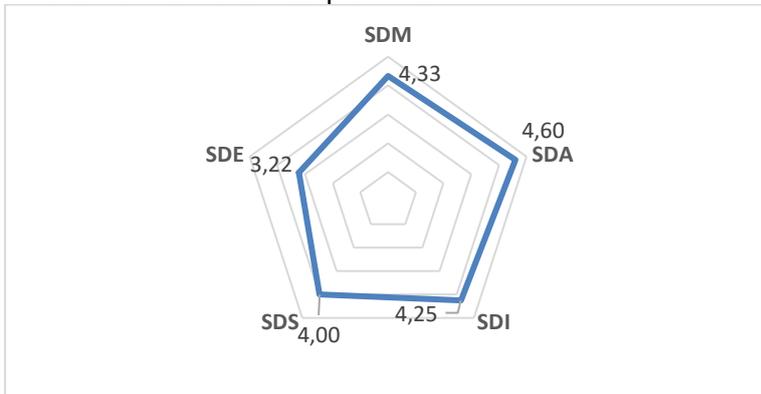
Gambar 6. Sustainable Livelihood Approach (SLA) Desa Srirahayu

Sementara itu, untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat setempat khususnya untuk para peternak sapi potong dilakukan pelatihan dari Dinas Peternakan Kabupaten Bandung yang diselenggarakan setiap tahun, jika dilihat dari aspek infrastrukturnya Desa Srirahayu memiliki akses jalan cenderung bagus dibandingkan di beberapa lokasi kajian lainnya karena Desa Srirahayu cenderung mengoptimalkan dana desa untuk perbaikan dan pelebaran jalan, dan juga tempat pendidikan namun pemanfaatan infrastrukturnya belum optimal. Untuk aspek ekonomi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan Desa Margamukti, hal tersebut dikarenakan tidak adanya lembaga keuangan untuk sistem simpan pinjam. Selain itu, budaya di wilayah ini hanya menyimpan tabungan dalam bentuk usaha ternak yang akan dipanen pada hari raya idul adha.

Analisis Sustainable Livelihood Approach (SLA) Desa Pawidean

Berdasarkan hasil analisis SLA Desa Pawidean menggambarkan bahwa wilayah ini memiliki kekuatan pada potensi alam yaitu yang mampu dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat setempat. Hal tersebut didukung dengan kualitas SDM yang cukup tinggi juga didukung lainnya seperti pada aspek ekonomi dan juga sosial. Meskipun diantara kelima aspek tersebut aspek SDE paling rendah skor nya namun jika dibandingkan dengan wilayah upland dalam kajian ini cenderung masih tergolong tinggi. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa wilayah ini sudah cukup maju baik dari kualitas SDM maupun lainnya. Jika dilihat dari berbagai fasilitas di wilayah ini cenderung cukup maju begitupun dengan roda pergerakan ekonomi yang

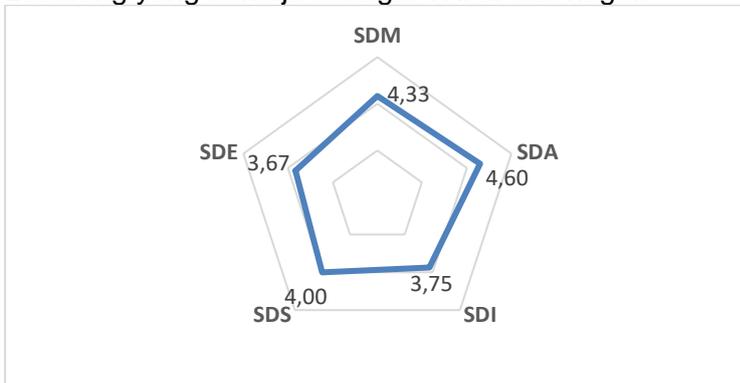
mampu mengembangkan usaha taninya dengan baik. Jika dilihat dari pendukung ekonominya, sarana tempat penampungan untuk pengembangan usaha komoditi unggulan seperti mangga sudah tersedia dan cukup besar.



Gambar 7. Sustainable Livelihood Approach (SLA) Desa Pawidean

Analisis Sustainable Livelihood Approach (SLA) Desa Losarang

Kekuatan terbesar wilayah Desa Losarang ini adalah dari aspek SDA dimana wilayah ini memiliki luasan lahan yang cukup besar dengan pemanfaatan utama untuk pengembangan komoditi besar. Selain itu, masyarakat setempat juga memanfaatkan SDA tersebut dengan mengembangkan usaha perikanan budidaya seperti ikan lele yang cakupan pasarnya sudah cukup luas. Namun, berbeda dengan Desa di wilayah Selatan Provinsi Jawa Barat lainnya, infrastruktur di wilayah ini cenderung rendah yakni 3,75, namun jika dibandingkan dengan wilayah kajian di Barat Provinsi Jawa Barat tentunya masih termasuk tinggi. Secara ekonomi, kekuatan aspek ini berada pada adanya kemudahan pada akses lembaga keuangan serta pengembangan usaha komoditi beras dan perikanan yang sudah memiliki pangsa pasar yang cukup luas. Tingginya kekuatan SDE juga didukung dengan banyaknya masyarakat Desa Losarang yang bekerja sebagai TKI di luar negeri

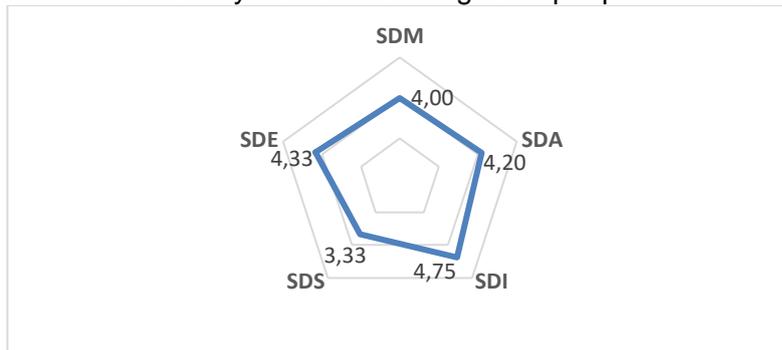


Gambar 8. Sustainable Livelihood Approach (SLA) Desa Losarang

Analisis Sustainable Livelihood Approach (SLA) Desa Karangsong

Berdasarkan hasil analisis SLA yang tergambar pada diagram pentagon menunjukkan bahwa Desa Karangsong memiliki potensi cukup tinggi pada aspek SDA, SDI dan juga SDM dan SDE. Dimana potensi alam yang paling banyak dimanfaatkan untuk pengembangan komoditi di bidang perikanan baik tangkap maupun budidaya ikan payau. Hal ini juga didukung dengan berbagai fasilitas oleh pemerintah salah satunya adalah adanya papan pemantau cuaca, TPI dan lainnya, sehingga para nelayan mampu mengurangi resiko kecelakaan karena cuaca buruk. Selain itu, fasilitas akomodasi dan akses jalan serta pendidikan di wilayah ini juga cukup memadai sehingga memudahkan untuk terjadinya proses pergerakan atau pengiriman

komoditi dari wilayah ke kota sebagai tempat pemasaran utamanya.



Gambar 9. Sustainable Livelihood Approach (SLA) Desa Karangsong

Sementara itu, keterbukaan masyarakat terhadap orang baru cenderung tidak terlalu terbuka hal ini terlihat dimana aspek SDS memiliki skor cukup kecil dibandingkan aspek lainnya yakni 3,33, sementara aspek tertinggi yakni pada potensi SDI (4,75), hal tersebut tentunya karena banyaknya fasilitas yang tersedia di wilayah ini.

KESIMPULAN

Hubungan desa kota di wilayah studi lebih terlihat pada lini hilir dimana desa-desa studi menjadi pemasok utama produk-produk pangan ke wilayah kota sekitar. Pada lini hulu hubungan dalam penyediaan permodalan usaha dan sarana produksi terbilang kecil dapat dilihat dari arus investasi dari kota ke desa yang masih minim. Secara umum petani mengatasi kebutuhan modal usaha secara mandiri meski ada petani yang mendapatkan modal usaha dari pinjaman bank/koperasi/perusahaan mitra. Lahan atau ternak yang dikelola petani di desa-desa studi umumnya adalah milik sendiri. Namun demikian ada pula lahan atau ternak milik orang lain yang dikelola petani dengan sistem sewa/bagi hasil/gadai. Meski demikian pemilik lahan atau ternak mayoritas orang sekitar desa/kecamatan dan masih memiliki hubungan kerabat dengan petani. Produk utama yang dihasilkan petani umumnya masih berbentuk produk primer.

Dengan demikian terdapat berbagai rekomendasi yang disarankan yaitu:

1. Diperlukan adanya peningkatan potensi SDM dari aspek pendidikan dan keterampilan agar mampu meningkatkan kualitas usaha tani yang lebih profesional
2. Dari sisi infrastruktur diperlukan adanya peningkatan infrastruktur pendukung pengembangan komoditi unggulan di masing-masing desa
3. Untuk meningkatkan pengembangan usaha tani komoditi sentra di setiap wilayah diperlukan adanya peningkatan jejaring pemasaran khususnya lintas wilayah pada sejumlah komoditi unggulan desa dan peningkatan efisiensi saluran pemasaran melalui kemitraan petani langsung dengan perusahaan atau koperasi
4. Diperlukan adanya kerjasama antar lembaga pemerintah untuk mendorong pengembangan usaha tani dalam upaya menciptakan desa mandiri.

Daftar Pustaka

- Andriani R at al. 2019. Kajian Potensi dan Kendala dalam Proses Usaha Tani dan Pemasaran Mangga di Kabupaten Indramayu 20(3): 215-221.
- Badan Pusat Statistik. 2021. Provinsi Jawa Barat Dalam Angka. [Internet]. <https://jabar.bps.go.id/publication/2021/02/26/4d3f7ec6c519dda0b9785d45/provinsi->

jawa-barat-dalam-angka-2021.html

- Badan Pusat Statistik. 2021. Kabupaten Garut Dalam Angka. [Internet]. <https://garutkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/ce10c1ee0a8e01814340e334/kabupaten-garut-dalam-angka-2021.html>
- Badan Pusat Statistik. 2021. Kabupaten Bandung Dalam Angka [Internet]. <https://bandungkab.bps.go.id/publication/2021/02/26/5fdc9639a54604ba478eb46e/kabupaten-bandung-dalam-angka-2021.html>
- BPS. 2022. **Tinjauan Ekonomi Provinsi Jawa Barat 2022**. <https://jabar.bps.go.id/publication/download.html?nrbfveve=ZTE3Zjk2MzA2YzFhNzNiO-WQwMzY0Yjly&xzmn=aHR0cHM6Ly9qYWJhcn5icHMuZ28uaWQvcHVib-GljYXRpb24vMjAyMy8wNS8wOS9IMTdmOTYzMDZjMWE3M2I5ZDAzNjRiM-jlvdGluamF1YW4tZWtvcj9taS1wcm92aW5zaS1qYXdhLWJhcmF0LTI-wMjluaHRtbA%3D%3D&twoadfnoarfeauf=MjAyMy0wNi0wNyAy-MDowNDoxOQ%3D%3D>
- Hastuti, D. dan S.N. Awami. 2017. Analisis Ekonomi Usahatani Sapi Potong di Kelurahan Plalangan Gunungpati Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Cendekia Eksakta*. 2(1): 24- 34.
- Hendayana R. 2003. Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional. *Jurnal Informatika Pertanian*. Vol 12. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Bogor.
- Andriani, R., Kusumo B, Rasmikayati, E., Mukti G.W., dan Fatimah Sri. 2019. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan petani mangga dalam pemilihan pasar di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Penyuluhan*. Vol 15 (2) : Hal 286-298.
- Sunaenah, Nurlina, L. dan Mauludin, M.A. 2017. Pelaksanaan Hijauan Pakan Ternak Bagi Petani Plasma pada Perusahaan Penggemukan Sapi Potong (Studi Kasus pada PT. Kadila Lestari Jaya di Desa Srirahayu Kecamatan Cikancung, Kabupaten Bandung). *Jurnal Universitas Pajajaran*. Vol 6 (1): 1-11.